

Daftar Isi
Jurnal **Masyarakat dan Budaya**
Volume 19 No. 3 Tahun 2017

	Halaman
Pengantar Redaksi	iii
Topik:	
☞ The Role of Viral Video in Indonesian Politics <i>Pratiwi Utami</i>	327
☞ Kyai Selebriti Dan Media Baru <i>Siti Mariatul Kiptiyah</i>	339
☞ Nelayan Brondong dalam Konstruksi Keberagaman (Studi Fenomenologi pada Masyarakat Nelayan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan) <i>Nike Kusumawanti</i>	353
☞ Berebut “Berkah” <i>Sandang Selirang</i> dalam Perspektif Beberapa Komunitas Masyarakat Muslim Kota Gede, Yogyakarta <i>Waryono</i>	369
☞ <i>Tulude</i> : Antara Modernitas dan Tradisi Masyarakat Pulau Marore <i>Esty Ekawati</i>	385
☞ Pemertahanan Bahasa Ibu Tentang Tempat-Tempat Sakral dan Tantangan Perubahan Sosial Budaya Orang Marori dan Kanum di Kabupaten Merauke, Papua <i>I Ngurah Suryawan</i>	397
☞ Bahasa Ibu yang Kehilangan ‘Ibu’ (Kajian Sociolinguistic Bahasa yang Terancam Punah di Maluku Utara) <i>Imelda</i>	419
☞ Memahami Etnisitas di Perkotaan: Politik Inter-Ruang di Kota Multikultural <i>Thung Ju Lan</i>	435
☞ Penelitian Etnografi Dibalik Pencegahan Konflik dan <i>Affirmative Action</i> Perlindungan Kekayaan Budaya: Memahami Sebuah Hibriditas Kebudayaan <i>M. Alie Humaedi</i>	447
☞ Peran Pemerintah, Kapitalis, dan <i>Netters</i> dalam Mengontrol Media (Analisis Terhadap Studi Media di LIPI) <i>Nina Widyawati</i>	469
Tinjauan Buku:	
☞ Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Luis Feneteruma	485

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman.

Pada edisi nomor 3 tahun 2017 ini, *Jurnal Masyarakat dan Budaya* menerbitkan tulisan-tulisan yang terkait dengan tema “identitas”, terutama agama, bahasa, budaya, dan etnis. Artikel-artikel tentang identitas itu merupakan kajian ilmiah yang bersinggungan erat dengan perkembangan politik kontemporer yang terjadi di Indonesia tahun 2017. Selain tulisan-tulisan yang bertemakan identitas, edisi kali ini juga memuat dua riset artikel terkait penelitian etnografi dan media yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.

Edisi kali ini dimulai dengan tulisan yang berjudul “The Role of Video in Indonesian Politics” yang mendiskusikan tentang potongan video dari pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Al-Maidah 51 yang menjadi viral. Dalam analisisnya, tulisan ini membandingkan tiga jenis video, yaitu: video viral, video dokumentasi, dan video berita. Berbeda dari dua jenis video yang lain, video viral bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga membawa pesan lain kepada penonton. Penulis juga memperkaya tulisan ini dengan kajian sejarah terkait video viral di berbagai belahan dunia. Masih terkait dengan media, tulisan kedua yang terbit di edisi ini berjudul “Kyai Selebriti dan Media Baru: Studi tentang K.H. Anwar Zahid”. Tulisan ini menganalisis tentang peran *YouTube* dalam membangun dan mempertahankan otoritas keagamaan seorang kyai tradisional di tengah munculnya kyai-kyai dan otoritas keagamaan baru yang difasilitasi oleh sosial media seperti Facebook, Twitter, dan YouTube.

Berbeda dari tulisan pertama dan kedua yang melihat kekuatan media sebagai penggerak masyarakat atau pembentuk otoritas keagamaan, tulisan ketiga edisi ini melihat fenomena keberagaman masyarakat di Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Tulisan yang berjudul “Nelayan Brondong dalam Konstruksi Keberagaman: Studi Fenomenologi pada Masyarakat Nelayan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan” ini tidak memasukkan aspek globalisasi dalam analisisnya. Ia justru melihat bahwa faktor sejarah dan lokalitas memiliki peran penting dalam membentuk model keberagaman di tempat itu.

Melanjutkan diskusi tentang hubungan agama dan budaya lokal, tulisan keempat untuk edisi ini membahas tentang dialektika antara agama dan kebudayaan lokal di Kotagede Yogyakarta. Tulisan yang berjudul “Berebut ‘Berkah’ *Sendang Selirang* dalam Perspektif Beberapa Komunitas Masyarakat Muslim Kotagede Yogyakarta” ini menggambarkan tentang perdebatan dan pertentangan tiga kelompok masyarakat setempat dalam memelihara dan memaknai budaya, yaitu *Sendang Selirang*. Ketiga kelompok itu adalah abangan, santri, dan intelektual. Apa yang ditampilkan dalam tulisan ini menambah perspektif baru dari wacana agama yang dibahas oleh tulisan-tulisan sebelumnya. Bahwa selain faktor media dan lokalitas, ada faktor lain yang berpengaruh pada cara pandang masyarakat, yaitu pendidikan atau intelektualitas.

Tulisan kelima dalam edisi ini membahas tentang kontestasi antara lokalisasi dan globalisasi. Dengan melihat kasus di Pulau Marore, tulisan yang berjudul “*Tulude*: Antara Modernitas dan Tradisi Masyarakat Pulau Marore” ini melihat bagaimana masyarakat di pulau tersebut dengan menggunakan kekayaan budaya setempat, yaitu tradisi *Tulude*, membentengi diri dari serbuan gelombang globalisasi. Tulisan keenam juga membahas tentang perubahan sosial budaya di Kabupaten Merauke, Papua. Kajian etnografis dalam tulisan yang berjudul “*Berdiri di Tong Pu Kebun*: Dokumentasi Bahasa dan Tantangan Perubahan Sosial Budaya Orang Marori dan Kanum dengan Lingkungannya di Kabupaten Merauke, Papua” ini mendiskusikan tentang komunitas setempat dalam mempertahankan bahasa dan budaya, diantaranya dengan menamai wilayah perkampungan, perkebunan, dan leluhur dengan bahasa lokal. Tulisan selanjutnya masih terkait bahasa, yaitu “Bahasa Ibu yang Kehilangan ‘Ibu’: Kajian Sociolinguistic Bahasa yang Terancam Punah di Maluku Utara”. Melengkapi tulisan sebelumnya, tulisan ini membahas tentang bahasa yang hampir mati karena berbagai faktor, terutama pengaruh bahasa asing, seperti Melayu dan Indonesia.

Setelah memperkaya pengetahuan dengan berbagai kajian tentang bahasa, agama, dan budaya, edisi ini kembali ke persoalan tentang pemahaman dan pemaknaan identitas tersebut dalam konteks politik kontemporer. Kali ini terkait dengan etnisitas. Tulisan yang berjudul “Memahami Etnisitas di Perkotaan: Politik Inter-ruang di Kota Multikultural” membahas tentang penggunaan identitas etnis dalam negosiasi politik di perkotaan yang seringkali membuat masyarakat terkotak-kotak berdasarkan identitas primordialnya. Analisis tentang politisasi etnis ini juga bias diterapkan dalam konteks identitas lain yang dibahas dalam tulisan-tulisan sebelumnya.

Dua tulisan terakhir dalam edisi ini memaparkan tentang berbagai kajian yang telah dilakukan LIPI terkait dengan tema bahasa, budaya, dan juga media. Dua tulisan itu berjudul “Penelitian Etnografi di Balik Pencegahan Konflik dan *Affirmative Action* Perlindungan Kekayaan Budaya: Memahami Sebuah Hibriditas Kebudayaan” dan “Peran Pemerintah, Kapitalis, dan Netters dalam Mengontrol Media: Analisis terhadap Studi Media di LIPI”. Ini akan memberikan informasi terkait sejauhmana LIPI telah mendalami tema-tema ini dan bias menjadi referensi untuk kajian-kajian selanjutnya. Dua tulisan ini juga berfungsi menganalisis tulisan-tulisan sebelumnya dan menjadi penutup dari artikel-artikel di edisi ini.

Selamat membaca.

Jurnal Masyarakat dan Budaya

Volume 19 No. 3 Tahun 2017

THE ROLE OF VIRAL VIDEO IN INDONESIAN POLITICS

Pratiwi Utami
Monash University
pratiwi.utami@yahoo.com

Abstract

Social media offers the wide availability and facility to exchange information. It provides space for people to aggregate around common interests and narratives. At given situations, content can spread rapidly across networks and go viral. This paper attempts to reveal the meaning and the role of viral video in Indonesia's contemporary politics, using Al-Maida 51 viral video as the case study. To achieve that, this paper utilises an archival analysis of videos and documents to investigate what components constitute virality. Basing on the theory and the logic of "virality", this paper examines the key factors that allow a video to go viral generally and in the specific context of Indonesia. This article also provides a comparison between viral political video with documentary video and news video viewed from production, distribution, and consumption perspectives. The comparison suggests that viral video is not just a message or product, but a medium for other messages. Viral videos are platforms of ideas and they open the opportunities for new values and interpretations as well as different forms of political participation. The study concludes that user's intervention in media-making process is important; in the case of the Al-Maida 51 viral video, a user's specific intervention can lead a shift from a documentary work to a piece of video with political impact. Furthermore, users' contribution in spreading a video and adding their personal comment about it in their post is indicative to the role of the users as intermediaries who might not create the virality, but can stimulate it.

Keywords: *Al-Maida 51, political communication, social media logic, virality, viral video*

KYAI SELEBRITI DAN MEDIA BARU

Siti Mariatul Kiptiyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sitimariatulkiptiyah1@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menganalisis munculnya kyai selebriti di Indonesia utamanya pada K.H. Anwar Zahid yang ceramahnya banyak diunggah di media *YouTube*. Model dakwah dari waktu ke waktu terus berubah, dan ceramah di *YouTube* adalah salah satu bentuk bagaimana dakwah disebarluaskan melalui media baru. Studi ini akan menguji seberapa besar peran *YouTube* sebagai media baru dalam menciptakan otoritas baru bagi seorang kyai melalui pengajiannya. Kajian ini penting untuk melihat bagaimana kehadiran media baru memperkuat otoritas kyai sebagai pemimpin agama di masyarakat. Pertanyaan yang hendak penulis jawab dalam penelitian ini adalah seperti apakah otoritas kyai di era media baru? Bagaimana K.H. Anwar Zahid membangun otoritasnya? Bagaimana K.H. Anwar Zahid menggunakan otoritas tersebut dalam ceramahnya? Penelitian ini mengkombinasikan data empiris dan teoritis terhadap ceramah K.H. Anwar Zahid yang bersifat daring (*YouTube*) dan luring (langsung). Hasil studi ini menunjukkan bahwa media baru tidak menggeser otoritas tradisional seorang kyai sebagai pemimpin agama, tetapi justru otoritas tersebut semakin diperkuat dengan otoritas selebriti dari media baru yang mendapat pengakuan secara konsensus oleh masyarakat.

Kata kunci: ceramah, kyai, media baru, otoritas agama.

NELAYAN BRONDONG DALAM KONSTRUKSI KEBERAGAMAAN (STUDI FENOMENOLOGI PADA MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN BRONDONG, KABUPATEN LAMONGAN)

Nike Kusumawanti

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
nike_kusumawanti@yahoo.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memahami esensi keberagamaan nelayan dengan cara: (1) Menjelaskan transformasi ideologi dan agama yang terjadi di Brondong dari masa ke masa, (2) Memahami proses konstruksi sosial masyarakat nelayan Brondong dalam memaknai agama. Kedua permasalahan tersebut akan didekati dengan perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dan Praktik Sosial Pierre Bourdieu, dengan pendekatan fenomenologi. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, transformasi ideologi dan agama yang terjadi pada masa Kerajaan Mataram hingga pergerakan sosial pada tahun 1965 berpengaruh pada dinamika ideologi dan keagamaan masyarakat nelayan Brondong. *Kedua*, konstruksi sosial atas religiusitas nelayan menunjukkan adanya perbedaan keberagamaan di level struktural dan kultural karena terjadi kompetisi kekuatan modal sosial dan modal simbolik yang dipertarungkan dalam ranah masyarakat nelayan Brondong.

Kata kunci: konstruksi sosial, religiusitas nelayan, transformasi ideologi dan agama.

BEREBUT "BERKAH" SENDANG SELIRANG DALAM PERSPEKTIF BEBERAPA KOMUNITAS MASYARAKAT MUSLIM KOTA GEDE, YOGYAKARTA

Waryono

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
waryono2@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang fenomena budaya lokal Sendang Selirang. Sendang Selirang merupakan tradisi membersihkan kolam yang berada di bekas lingkungan Kerajaan Mataram Awal di Kota Gede. Tradisi tersebut dimaknai secara berbeda oleh tiga kelompok di Kota Gede, yaitu kelompok Abangan, Santri, dan Intelektual. Permasalahannya, mengapa dan apa latar belakang perbedaannya? Meskipun berbeda, mengapa warga Kota Gede tetap harmonis? Penelitian etnografi dengan wawancara mendalam dan observasi ini telah menemukan bahwa bagi masyarakat Abangan, Sendang Selirang merupakan ritus dan upacara yang dilaksanakan dengan emosi keagamaan dan mempunyai sifat keramat. Pemaknaan ini berbeda dengan kelompok santri yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah. Oleh beberapa aktivis Muhammadiyah, ritual ini dianggap sebagai bagian dari takhayul, bid'ah, dan kurafat, sehingga harus dihindari. Sementara itu, bagi kelompok intelektual, peristiwa nawa sendang tidak cukup dipandang dari sisi agama, melainkan juga perlu dilihat dari sisi budaya. Hal itu merupakan "jalan tengah" untuk menengahi dua kelompok sebelumnya dan menghindari terjadinya potensi konflik.

Kata kunci: Sendang Selirang, abangan, santri, cendekiawan, harmoni.

TULUDE : ANTARA MODERNITAS DAN TRADISI MASYARAKAT PULAU MARORE

Esty Ekawati
Pusat Penelitian Politik - LIPI
esty1wati@gmail.com

Abstrak

Pulau-pulau kecil terluar di Indonesia merupakan wilayah yang rentan dalam menghadapi hambatan dan tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal. Perlu perlakuan khusus bagi wilayah tersebut terutama yang berbatasan dengan negara lain. Pulau Marore menjadi salah satu Pulau kecil terluar di sisi Utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sebagai pintu gerbang aktivitas tradisional dan internasional, Pulau Marore tak luput dari terpaan arus globalisasi. Tulisan ini mengkaji mengenai ketahanan budaya masyarakat perbatasan di Pulau Marore di era globalisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara dengan masyarakat Marore. Temuan lapangan menunjukkan meskipun masyarakat Marore memiliki keterbatasan dalam infrastruktur, sosial-ekonomi maupun sumber daya manusia namun, ketahanan budaya masyarakat Marore tetap terjaga melalui suatu tradisi leluhur yang hingga kini masih dipegang teguh oleh masyarakat Sangir yakni tradisi Tulude.

Kata kunci: Pulau Marore, perbatasan, ketahanan budaya, Tulude

PEMERTAHANAN BAHASA IBU TENTANG TEMPAT-TEMPAT SAKRAL DAN TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA ORANG MARORI DAN KANUM DI KABUPATEN MERAUKE, PAPUA

I Ngurah Suryawan
Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua (UNIPA)
ngurahsuryawan@gmail.com

Abstrak

Artikel ini memfokuskan pada penggalian bahasa ibu tentang tempat-tempat sakral bagi Orang Marori dan Kanum di Kabupaten Merauke, Papua. Bahasa-bahasa ibu bagi tempat-tempat sakral mengandung makna yang mentautkan hubungan manusia dengan lingkungannya. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan kaya yang menunjukkan relasi panjang dengan lingkungan alam sekitarnya. Dari perspektif masyarakat terdapat pemetaan ruang-ruang hidup yang mencakup wilayah perkampungan, perkebunan, dan leluhur (*pamali*). Masyarakat juga menamai wilayah-wilayah tersebut dengan bahasa ibu yang biasanya mengacu kepada nama-nama tumbuhan, hewan, atau peristiwa sejarah penting di lokasi tersebut. Bahasa-bahasa tersebut memiliki makna yang luas dan menjadi cermin ekspresi kebudayaan orang Marori dan Kanum. Kondisi perubahan sosial budaya menghimpit mereka dan pondasi pengetahuan lokal dalam pemanfaatan lingkungan menjadi tergoyahkan. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan kaya yang menunjukkan relasi panjang dengan lingkungan alam sekitarnya. Artikel ini menelusuri makna dibalik bahasa-bahasa ibu pada ruang-ruang hidup orang Marori dan Kanum. Pemertahan bahasa ibu menjadi sangat urgen di tengah perubahan sosial budaya yang mengakibatkan rusaknya lingkungan. Usaha tersebut tidak mudah di tengah mulai tercerabutnya akar budaya dan hilangnya pengetahuan bahasa lokal. Penghargaan terhadap lingkungan menjadi terabaikan dan perusakan berlangsung terus-menerus untuk kepentingan uang.

Kata kunci: pemertahanan, bahasa ibu, perubahan, sosial budaya, lingkungan, ruang-ruang hidup

BAHASA IBU YANG KEHILANGAN 'IBU' (KAJIAN SOSIOLINGUISTIS BAHASA YANG TERANCAM PUNAH DI MALUKU UTARA)

Imelda

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI
imeldamatahari223@gmail.com

Abstrak

Bahasa Ibu merupakan salah satu bahasa di Maluku Utara yang telah mencapai puncak kepunahannya. Saat ini penuturnya tinggal satu orang lagi karena penutur lainnya telah tua dan sakit. Sayangnya, generasi Ibu yang lebih muda telah mengganti kedudukan bahasa daerahnya dengan bahasa Ternate yang merupakan bahasa resmi di Kesultanan Ternate. Bahkan generasi yang lebih muda menggunakan bahasa Melayu yang dikenal sejak perdagangan masa lalu ketika Ternate menjadi titik jalur sutra dan bahasa Indonesia yang dipakai ketika Indonesia merdeka dan menjadikan bahasa ini bahasa nasional.

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai data utama. Wawancara tersebut berisi berbagai pola perilaku berbahasa orang Ibu dari 80 tahun yang lalu hingga saat penelitian ini dilakukan. Selain itu penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder mengenai sejarah kerajaan dan perdagangan di Kepulauan Maluku, terutama Ternate, untuk memahami sebab-sebab punahnya bahasa Ibu.

Secara kebahasaan, orang ibu dapat digambarkan dengan frase bilingual dalam perubahan. Artinya, mereka dapat menggunakan berbagai bahasa (bahasa Ibu, Ternate, Melayu, dan Indonesia) akan tetapi terdapat perbedaan pola pada setiap generasi. Pada generasi yang berumur 80-an, bahasa Ibu masih dipakai untuk ranah keluarga dan bahasa Ternate dan Melayu untuk komunikasi antaretnik. Sementara itu, pada generasi berumur 50-60 tahun, bahasa Ibu tidak dipakai lagi ranah keluarga, diganti dengan bahasa Ternate, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dengan demikian bahasa Ibu telah mengalami tahap akhir pergeseran bahasa, yaitu generasi muda sudah sangat akrab dengan bahasa mayoritas (baca: Ternate), sekaligus semakin menyadari bahwa bahasa Ibunya sudah tidak memiliki posisi tawar. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain: (1) pengaruh bahasa Ternate sebagai bahasa Kesultanan Ternate yang melakukan ekspansi ke pulau Halmahera, (2) pengaruh bahasa Melayu sebagai bahasa Perdagangan, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Indonesia. Dengan demikian, Bahasa Ibu berproses menjadi punah karena persaingan politik dan ekonomi yang terjadi dari masa lalu hingga kini.

Kata kunci: bahasa Ibu, kepunahan bahasa, Ternate, Melayu

MEMAHAMI ETNISITAS DI PERKOTAAN: POLITIK INTER-RUANG DI KOTA MULTIKULTURAL

Thung Ju Lan

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI
thung_julan@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas pemaknaan konsep etnisitas di perkotaan yang berbeda dengan konsep 'kelompok etnik' di perdesaan. Pemaknaan etnisitas di perkotaan, seperti dikatakan Hirschman, tidak terkait dengan sifat asalnya yang primordial, melainkan karena etnisitas menjadi dasar dari organisasi politik dan ekonomi di masa lalu dan masa kini yang dapat diproyeksikan ke masa depan. Perspektif Hirschman menjadi penting untuk memahami dinamika etnisitas di perkotaan yang diterjemahkan dan diartikulasikan melalui "strategi komunikasi dan diferensiasi yang sangat dinamis". Ini juga terkait erat dengan fungsi baru etnisitas sebagai sumber daya bagi proses negosiasi politik di perkotaan untuk membangun-apayang dikatakan Ojeda-sebagai "skenario pengakuan baru oleh negara". Hal itu seperti yang terlihat pada kasus Pilkada 2017 yang sepertinya membelah masyarakat Jakarta atas dasar etnisitas (pribumi Islam-non-pribumi non-Islam).

Kata kunci: etnisitas, perkotaan, politik identitas kota, multicultural

PENELITIAN ETNOGRAFI DIBALIK PENCEGAHAN KONFLIK DAN AFFIRMATIVE ACTION PERLINDUNGAN KEKAYAAN BUDAYA: MEMAHAMI SEBUAH HIBRIDITAS KEBUDAYAAN

M. Alie Humaedi

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
humaedi2014@gmail.com

Abstrak

Konflik suku dan agama menjadi isu hangat dunia penelitian. Beragam pendekatan digunakan untuk memotret masalah, aktor, dan penyebab yang bisa diuraikan untuk meredam konflik. Sayangnya, banyak penelitian yang hanya menampilkan aspek permukaan, sehingga penyelesaiannya bersifat artifisial dan tidak kontekstual. Aspek kebudayaan dan kebahasaan terkait konflik, sebagai modal terpenting dalam penyelesaian konflik, kurang dilihat secara komprehensif. Di sisi lain, bahasa dan budaya daerah hanya dimaknai sebagai khazanah kebudayaan yang berorientasi pengembangan pariwisata saja. Upaya yang dilakukan pemerintah dan berbagai pihak baru sebatas pada pendokumentasian bahasa dan kekayaan budaya saja. Penelitian yang mampu mengungkap nilai dan praktik kebudayaan berbagai kelompok suku bangsa belum banyak menjadi media langkah strategis dalam mitigasi konflik. Pertanyaannya, bagaimana penelitian dan perspektif etnografi dapat berperan dalam upaya peredaman konflik dan afirmasi bagi upaya perlindungan kekayaan budaya daerah? Tulisan ini merupakan refleksi berbagai penelitian terkait bahasa dan budaya yang dilakukan oleh LIPI dan lembaga lain. Keterlibatan penulis dalam dunia penelitian etnografi bahasa dan budaya menjadi aspek penting refleksinya. Tulisan ini menjelaskan perkembangan dan kecenderungan penelitian kebudayaan di LIPI dan lembaga lain. Selain itu, penelitian etnografi budaya dan bahasa dilihat tidak hanya berdampak pada upaya perlindungan kekayaan budaya berbagai suku bangsa, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam peredaman konflik dan peneguhan kebangsaan.

Kata kunci: etnografi, mitigasi konflik, perlindungan budaya, hibriditas

PERAN PEMERINTAH, KAPITALIS, DAN *NETTERS* DALAM MENGONTROL MEDIA (ANALISIS TERHADAP STUDI MEDIA DI LIPI)

Nina Widyawati

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
widyawati11@yahoo.com

Abstrak

Studi media di LIPI berjalan seiring dengan isu-isu yang hangat di jamannya. Dimulai tahun 1976 ketika pemerintah Orde Baru ingin menggunakan televisi sebagai alat pembangunan. Pemerintah memutuskan untuk memiliki Sistem Komunikasi Satelit Domestik agar siaran televisi bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akses televisi yang luas dirancang untuk mempertahankan *status quo* dengan cara menyiarkan keberhasilan pemerintah. Kenyataannya televisi tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, sejak akhir pemerintahan Orde Baru sampai awal runtuhnya Orde Baru, LIPI banyak melakukan studi *media effect* menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah Orde Baru runtuh, sistem pemerintahan juga berubah dari sentralistis menjadi desentralistis. Media juga tumbuh menjadi institusi yang lebih demokratis. Pada saat yang sama, kapitalisasi media berkembang pesat. Industri media dikuasai oleh kapitalis dan hal ini kemudian berpengaruh kepada kebijakan dalam menentukan konten. Berkembanglah studi-studi kritis seperti ekonomi politik media dan analisis wacana kritis. Ketika TIK berkembang, peran kapitalis dalam mengontrol konten mulai digeser oleh *netters*. Pada era ini, LIPI melakukan studi tentang masyarakat jaringan. Dengan demikian, pola perkembangan studi media di LIPI tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Amerika dan Eropa. Perubahan suatu rezim berpengaruh terhadap peran media yang pada akhirnya mempengaruhi tema studi. Bedanya, studi di LIPI lebih lambat antara 10-20 tahun dari perkembangan studi di Amerika dan Eropa.

Kata kunci: studi media, kontrol, pemerintah, kapitalis, *netters*

